

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan” (Oktasari,2015:56). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Dan pengertian lainnya yaitu : “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya)(Mulyadi, 2015:80).

Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Horn & Meter yang mengatakan “*Those actions by public and private individual for group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah) (Horn & Meter, 2009:121) Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai\$tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan kebijakan sebelumnya.(Horn & Meter, 2009:121) Yang berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang – undang atau peraturan ditetapkan serta dana yang disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain juga Implementasi

kebijakan dianggap sebagai fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Grundle, 2015:45)

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat dipahami bahwa pengertian dari Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi berkaitan dengan Negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

### **2.1.2 Kebijakan**

Sebelum membahas konsep kebijakan publik lebih jauh, kita perlu mengkaji terlebih dahulu definisi- definisi dari beberapa para ahli mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris kita sering dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dll); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran. Pada dasarnya terdapat banyak sekali penjelasan mengenai kebijakan dari para ahli dengan berbagai sudut pandang.

Menurut Agustino,Leo mengatakan kebijakan sebagai serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino,Leo.2008:120)

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Wahab, 2001:3).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat M.Irfan Islamy yang mengemukakan pengertian kebijakan dalam bukunya yang berjudul

*Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Islamy, 1995:14).

Secara empiris sebuah kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program. Dalam suatu negara suatu kebijakan dianggap sebagai sebuah rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang sedang mempunyai tujuan tertentu, kemudian kebijakan itu harus diikuti oleh seseorang atau kelompok pelaku untuk dapat memecahkan suatu masalah yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan diatas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh aparatur, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan dan Terkadang dalam pembuatan kebijakan, tidak sesuai dengan keadaan atau masalah yang terjadi.

### **2.1.3 Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik sebenarnya sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu politik. Kebijakan Publik lingkupannya sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hokum, dan sebagainya. Disamping itu kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti undang undang, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Proses penentu sebuah kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu : Mengidentifikasi isu- isu kebijakan publik, mengembangkan proposal kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan public, melaksanakan kebijakan public, mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan.

Nugroho menyatakan karakteristik dari kebijakan publik, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh (Nugroho,2015). yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh (Nugroho,2015).

sebagaimana dikutip Tangkilisan Woll menyebutkan bahwa: Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Tangkilisan,2003).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas tentang Kebijakan Publik disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu serangkaian kegiatan atau tindakan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik dan biasanya tertuang dalam ketentuan - ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Membuat suatu kebijakan publik memerlukan beberapa tahapan-tahapan. Tahapan pembuatan kebijakan publik sangat kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Tahapan-tahapan

kebijakan publik menurut William Dun sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) sebagai berikut:

- a. Penyusunan Agenda, Para pejabat yang terpilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada akhirnya tahap ini masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Formulasi Kebijakan, Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (policy alternatives/ policy options) yang ada. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Adopsi Kebijakan, Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

- c. Implementasi Kebijakan, Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan - catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain terkadang ditentang oleh para pelaksana.
- d. Evaluasi Kebijakan, Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukura – ukuran atau kriteria – kriteria yang menjadi dasar untuk melihat apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah atau belum mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada

masa yang akan datang. Dalam fase formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya. Jika kita melepaskan kenyataan politik dari proses pembuatan kebijakan publik, maka akan terbukti kebijakan publik yang dihasilkan itu akan miskin aspek lapangannya dan akan menemui banyak persoalan pada tahap penerapan berikutnya. Oleh sebab itu perlu adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik ini.

#### **2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam pembuatan kebijakan merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam artinya yaitu proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat.

Menurut Riant D Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik* menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. (Nugroho, 2004:158).

Menurut Edwards, dalam bukunya yang berjudul *“Implementing public policy”* mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai berikut :

*“Policy implementation as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”* (Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah Undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan , atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya).(Edward ,1980:1).



Definisi tersebut menjelaskan bahwa jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasi tidak tepat. Namun bahkan sebuah kebijakan yang brilliant sekalipun jika diimplementasikan buruk bisa gagal juga untuk mencapai tujuan para perencangnya.

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edward III mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi adalah :

a. *Communication*

*“The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to.*

*appropriate personal before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. many obstacles lie in the path of transmission of implementation communications”.*

a. *Resources*

*“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the person responsible out policies lack the resources to do an affective job, implementation will not be effective. important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation: the authority to ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be developed”.*

b. *Dispositions*

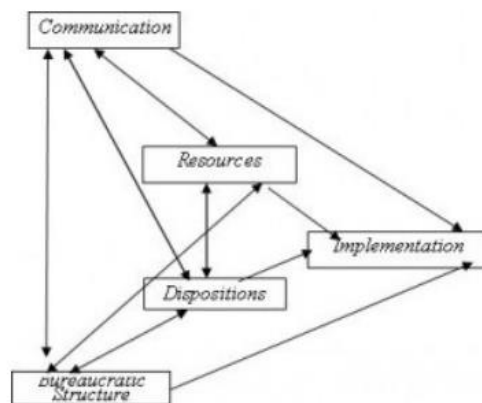
*“The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. if implementation is to proceed effectively, not only must implementors know*

*what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. one of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. another reason is the complexity of the policies themselves. the way in which implementors exercise their direction, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests.*

c. *Bureaucratic Structure*

*“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs). the former develop as internal responses to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia. (Edward III, 1980).*

Gambar 2.1  
**Model Edward III**



Sumber : <http://mulyono.staff.uns.ac.id/files/2009/07/ge3.jpg>

Berdasarkan gambar diatas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan memiliki Empat Variabel yang memepengaruhi berjalan suatu kebijakan pada masyarakat yakni:

1. Komunikasi, secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk-petunjuk tersebut harus dikomunikasikan secara jelas.
2. Sumber daya, perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.
3. Disposisi, kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan awal.

4. Struktur birokrasi, birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Berdasarkan empat variable diatas dapat dipahami bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini karena memiliki hubungan antara masalah yang peneliti lakukan.

Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Grindle, yaitu implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari yang sebelumnya telah dirumuskan.

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya ,model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan

“*Implementation as a Political and Administrative Process*” yaitu keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcome*). Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) Isi kebijakan meliputi:

- a. *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan,
- b. *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan,
- c. *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas,
- d. *site of decission making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan
- e. *resources commited*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Isi implementasi meliputi:

1. *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat;
2. *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan

3. *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai model Grindle ini, T.B. Smith pun mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Berbagai pendapat para ahli tentang implementasi kebijakan tersebut peneliti menggunakan teori Model implementasi kebijakan George Edwards III dengan Empat Variabel sebagai Teori acuan penelitian karena memiliki hubungan antara masalah yang peneliti lakukan yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi (Edward III,1980:9)

Faktor-Faktor implementasi kebijakan di atas maka peneliti uraikan sebagai berikut:

*Pertama, Communications* Faktor tersebut menjadikan gambaran untuk peneliti bahwa dibutuhkan komunikasi yang baik agar terciptanya keberhasilan implementasi kebijakan. Para pembuat keputusan harus mengetahui apa yang mereka kerjakan sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi

diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan ditetapkan dalam masyarakat.

Proses implementasi kebijakan dalam model Direct and Indirect Impact of Implementation yang pertama, communications (komunikasi) menurut George C. Edwards III yaitu :

“The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be followed. Naturally, these communications need to be accurate and they must be accurately perceived by implementers. Many obstacles lie in the path of transmission of implementation communication.” (Edwards III, 1980:53).

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang baik terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

*Kedua, Resources* Faktor atau indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Proses implementasi kebijakan dalam model Direct and Indirect Impact of Implementation yang kedua adalah Resources (sumber daya) menurut George C. Edwards III yaitu:

*“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personel responsible for carrying out policies lack the resources to do an affective job, implementation will not be effective. important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation: the authority to ensure that policies are*

*carried out as they intended; and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be developed” (Edwards III, 1980:53).*

Sumber daya merupakan suatu sarana dan prasarana maupun kemampuan aparaturnya yang mendukung berjalannya suatu kebijakan.

*Ketiga, Dispositions* Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Edwards III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Proses implementasi kebijakan dalam model Direct and Indirect Impact of Implementation yang Ketiga, Disposition (disposisi) menurut George C. Edwards III, yaitu:

*“The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementers can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their discretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies, their attitudes, in turn, will be influenced by their view toward the policies per se and by how they see the policies affecting their organizational and personal interest.” (Edwards III, 1980:89).*



Berdasarkan pernyataan tersebut, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan.

*Keempat, Bureacratic Structure* menurut Edwards III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Proses implementasi kebijakan dalam model *Direct and Indirect Impact of Implementation* yang *Keempat, Bureacratic Structure* (Struktur Birokrasi) menurut George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, yaitu:

*“Policy implementers may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve, two prominent characteristics of bureaucracies are standarf operating procedurs (SOPs). the former develop as internal respons to the limited time and resources of implementers and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia.”. (Edwards III, 1980:125).*

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, namun pelaksana kebijakan terdapat kelemahan atau hambatan dengan struktur organisasinya maka tidak akan terlaksana atau terealisasi secara optimal. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari setiap orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan faktor-faktor lainnya tidak berjalan dengan lancar.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas bahwa implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan-tindakan yang nyata dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijaksanaan yang dilakukan individu atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga menciptakan suatu hasil dari kinerja implementasi kebijakan yang baik dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian bahwa setiap unsur memiliki suatu peran yang sangat penting dalam membangun implementasi kebijakan. Bahkan unsur-unsur diatas memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya keikutsertaan satu unsur akan dapat memberi pengaruh pada jalannya proses implementasi kebijakan.

#### **2.1.5 Electronic Government (*E-Government*)**

*E-government* memiliki berbagai macam pengertian dari beragam Lembaga maupun pemerintahan. Istilah *E-government* berasal dari bahasa asing yang merupakan singkatan kata dari *Electronic government* dengan arti Pemerintah elektronik.

Menurut **World Bank Group** definisi *e- government* adalah

*“e-government refers to the use by government agencies of information, technologies (such as wide area networks, internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.”*

(*e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti *wide area networks*, internet, dan *computer mobile* yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, aparatur pemerintah). (WorldBank,2002).

Menurut Anne Mozes mendefinisikan *e-government* adalah Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: Government to Citizens (G2C), Government to Business (G2B), dan Government to Governments (G2G) (Fatah, 2009).

Di Indonesia pengertian *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan web/internet (MENKOMINFO).

Menurut Heeks dalam Djunaedi *E-Government* diartikan sebagai pemanfaatan ICT untuk mendukung pemerintah yang baik (*good governance*).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa *E-Government* mencakup:

- a. *E-administration*: untuk memperbaiki proses kerja dalam pemerintahan dengan menghemat biaya, dengan membangun koneksi strategis dalam pemerintahan sendiri, dan dengan menciptakan pemberdayaan.
- b. *E-citizen & e-service*: menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dengan cara berbicara kepada warga dan mendukung akuntabilitas, demokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik.
- c. *E-society*: membangun interaksi diluar pemerintah dengan cara bekerja secara baik dengan pihak bisnis, agar bisa mengembangkan masyarakat dan pemerintah, serta membangun masyarakat madani (Djunaedi,2003).

Beberapa definisi *E-Government* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *E-Government* merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi secara online dengan menggunakan media internet atau perangkat lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk mentransformasikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, pihak bisnis, dan sesama pihak-pihak pemerintah lainnya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*.

#### 2.1.5.1 Konsep E – Government

Secara umum terdapat 4 (empat) konsep interaksi antar pelaku dalam *e-government*, yaitu:

a. **G to C** (*Government to Citizens*),

*Government* dengan *Citizen* yaitu suatu hubungan antara pemerintah dengan rakyat sehingga adanya akses informasi yang dapat dimanfaatkan/diperoleh masyarakat untuk kepentingannya. Contoh aplikasi jenis ini : masyarakat bisa mengakses data/informasi dari BPS, masyarakat dapat mendaftar ke PTN melalui internet, masyarakat dapat mengetahui pengumuman hasil ujian melalui SMS dari ponsel masing-masing, dan lain-lain.

b. **G to G** (*Government to Governments*)

Menghubungkan antara pemerintah dengan pemerintah. Yang dimaksud pemerintah dengan pemerintah adalah antara Pemerintah pusat dalam suatu negara dengan Pemerintah daerah. Contoh: Pelaporan, komunikasi antara pemerintah pusat di Jakarta dengan pemerintah daerah di Surabaya menggunakan fasilitas *on-line* (internet).

c. **G to B** (*Government to Business*)

*Government to business* yaitu relasi antara pemerintah dengan pelaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terdiri dari transaksi-transaksi

elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh relasi jenis ini adalah pebisnis dapat mengakses informasi, prosedur perizinan dari regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan kemudahan prosedur maka akan banyak investor yang menginvestasikan modalnya di Indonesia.

d. **G to E** (*Government to Employees*)

Hubungan antara pemerintah dengan pegawai baik pegawai negeri maupun sebagai karyawan/pekerja pemerintah. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan. Contoh :Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas SDM, penunjang proses mutasi, rotasi serta promosi seluruh karyawan pemerintahan.(Astuti,2008)

Keempat konsep interaksi *e-government* memiliki tujuan masing-masing. Namun,secara umum tujuan dari keempatnya sama yaitu untuk menyediakan akses informasi, dan pelayanan secara efisien pada pihak lain baik antar pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan karyawan pemerintah daerah maupun dengan pelaku bisnis. (Siau dan Long, 2009).

#### 2.1.5.2 Indikator Pengembangan E-Government

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh (Indrajit, 2004), masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

a. *Support*

Elemen support adalah elemen paling penting dalam pengembangan

*E-Government* perlu dukungan atau yang disebut *political will* dari pejabat publik. Hal ini agar konsep *E-Government* dapat diterapkan, tanpa adanya

itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-government* dapat terlaksana.

*b. Capacity*

*Elemen capacity* merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *E-Government* agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:

1. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government*.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *E-Government*.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

*c. Value*

Elemen value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh

pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *E-Government*. Dalam elemen value yang menentukan besar tidaknya manfaat *E-Government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.

### **2.1.5.3 Tahapan Pengembangan *E-Government***

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut (Inpres No.3 tahun 2003) :

a. Tingkat 1 - **Persiapan** yang meliputi :

1. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga
2. Penyiapan SDM
3. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center*, *Warnet*, *SME-Center*, dll.

4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- b. Tingkat 2 - **Pematangan** yang meliputi :
  1. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
  2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain:
- c. Tingkat 3 - **Pemantapan** yang meliputi :
  1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
  2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- d. Tingkat 4 - **Pemanfaatan** yang meliputi :
 

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan terintegrasi.

Tahapan-Tahapan tersebut sebuah gambaran dalam pelayanan dan interaksi dengan pemerintahnya, memperbaiki efisien dan efektivitas dan memperbaiki tanggapan atau tanggung jawab sistem pemerintahan kepada warga negaranya. (Sari dan Winarno, Implementasi E-Government,2012)

Menurut Indrajit (2002) dalam bukunya mengemukakan bahwa dalam penerapan *E-Government* terdapat indikator-indikator yang penting, berkaitan dengan berbagai infrastruktur serta strategi pendukungnya, dimana penerapan *E-Government* ini meliputi:

1. Data infrastruktur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan *E-Government*.
2. Infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan untuk mendukung menuju *E-Government*.
3. Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi pemerintah secara sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam *penerapan E-Government*.
4. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan *E-Government*.
5. Infrastruktur teknologi, penerapan *E-Government* banyak bertumpu pada adanya infrastruktur teknologi yang memadai. (Indrajit,2002:45)

Strategi pemikiran pemimpin, penerapan *E-Government* sangat membutuhkan pemimpin yang membawa visi *E-Government* dalam agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya

#### **2.1.5.4 Jenis Layanan E-Government**

Menurut Indrajit (2005) jenis layanan e- government dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, antara lain :

1. Jenis layanan yang bertujuan untuk penyediaan informasi seperti isi dan misi pemerintah, berbagai peraturan perundang-undangan, prosedur pendirian usaha, berbagai data kependudukan, pertanian dan perdagangan. Untuk jenis layanan yang pertama ini, pembangunan aplikasi e-government sangat bertumpu pada penciptaan halaman Web yang menarik dan komunikatif.
2. Jenis layanan yang bersifat komunikasi interaktif dua arah, seperti konsultasi perpajakan, diskusi tentang rancangan undang-undang dan lain sebagainya. Untuk jenis layanan ini, maka aplikasi e-government perlu kelengkapan fasilitas seperti video konferensi, atau aplikasi chatting dan email.
3. Jenis layanan yang bersifat transaksi, seperti permohonan KTP,IMB, pembayaran wajib pajak, listrik, PBB, air, telepon secara online,sistem e-procurement. Dengan jenis layanan tersebut, maka aplikasi e- government juga harus dilengkapi dengan sistem informasi on-line yang mendukung pencatatan setiap transaksi yang terjadi.

#### **2.1.5.5 Faktor-faktor Penghambat dan Penentu Keberhasilan Penerapan E-Government**

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan e-government di Indonesia diantaranya (Rahardjo,2001) :

- (1)Kultur berbagi (sharring) informasi belum ada,
- (2)Kultur mendokumentasi belum lazim, )
- (3)Langkanya SDM yang handal dibidang TI,
- (4)Infrastruktur yang belum memadai dan mahal,
- (5)Tempat akses informasi yang terbatas



Menurut Retnowati (2008) faktor – faktor penentu keberhasilan penerapan *e- government* adalah:

- (1)Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara atau di daerah terkait,
- (2)Infrastruktur telekomunikasi,
- (3)Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah,
- (4)Kesiapan SDM di pemerintah,
- (5)Ketersediaan dana dan anggaran,
- (6)Ketersediaan perangkat hukum,
- (7)Perubahan paradigma cara kerja dan perilaku SDM aparatur.

#### **2.1.6 Aplikasi**

Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus (Abdul Kadir, 2003). Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer. Beberapa teori yang mendefinisikan tentang Aplikasi yang dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai sudut pandang, diantaranya adalah : Menurut Yuhefizar Aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu (Yuhefizar,2012).

Selanjutnya, Menurut Kadir (2008:3) aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Aplikasi juga diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.

Aplikasi software yang dirancang untuk penggunaan praktisi khusus, klasifikasi luas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Aplikasi *software spesialis*, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu.
- b. Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu.

Kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara sistematis untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh manusia melalui komponen atau hardware komputer yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan program aplikasi, dengan demikian bisa membantu manusia untuk memberikan solusi dari apa yang diinginkan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pada pelaksanaannya *E-Government* yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung aplikasi NEW BIMMA masih mengalami beberapa masalah, diantaranya, masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya aplikasi tersebut, Penempatan tenaga kerja masih belum tercapai secara optimal juga masih terdapat informasi yang belum lengkap dalam info lowongan kerja.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung yang didalamnya masih terdapat beberapa

permasalahan, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C Edwards III, yang didalamnya mengandung makna bahwa implementasi suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya jika empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut berjalan sinergi satu sama lain. Menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* bahwa *Communication* (komunikasi) terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi), *Resources* (Sumber daya) terdiri dari *staff* (aparatur), *information* (informasi), *Authority* (wewenang), dan *Facilities* (fasilitas). *Dispositions* (sikap pelaksana) terdiri dari *Effects Of Disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) *Bureaucratic Structure* (Struktur birokrasi) terdiri dari *Standard Operating Procedures* (SOP), (Edwards III, 1980:11-12).

Menurut Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan sangat kecil untuk terjadi dan begitupula sebaliknya.

Transmisi penyampaian Informasi dan pesan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan dibuatnya Aplikasi NEW BIMMA.

Kejelasan komunikasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) dalam mengelola Aplikasi NEW BIMMA, Kejelasan komunikasi

harus jelas dan tepat membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Konsistensi Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dalam pengelolaan Aplikasi NEW BIMMA perlu konsisten dan jelas untuk terwujudnya maksud dan tujuan penggunaan Aplikasi NEW BIMMA ditetapkan atau dijalankan oleh para aparaturnya maupun para petugas dilapangan. Bilamana informasi kepada masyarakat.

Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA seharusnya memiliki sumber daya yang memadai, sumber daya tersebut meliputi aparatur, sarana maupun prasarana.

Disposisi merupakan sikap dan peranan dari aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan dalam mengelola Aplikasi NEW BIMMA, sikap aparatur perlu diperhatikan karena mempunyai hubungan penting terhadap Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA

Struktur birokrasi adalah sebuah kerangka kerja formal Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dalam pengelolaan Aplikasi NEW BIMMA agar terorganisir atau terkordinasi dengan baik. Adapun untuk mencapai tujuan dan target dari Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA. ini sebelumnya berdasarkan indikator berikut :

- a. komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pesan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung kepada masyarakat

dalam Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA terdiri dari:

1. penyampaian informasi adalah penyampaian informasi yang disampaikan oleh aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung kepada masyarakat Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA.
  2. Kejelasan adalah suatu kejelasan dengan terwujudnya maksud dan tujuan Informasi dalam Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA harus jelas dan konsisten.
  3. Konsistensi adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. sumber daya adalah pengaruh suatu hubungan dan peranan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung agar efisien dan efektif untuk terwujudnya Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA.
- Resources* terdiri dari:

1. staf adalah pelaku kebijakan yang memiliki kewenangan dalam Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA.
  2. *Information* (informasi) adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang berguna dalam Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA.
  3. *Authority* (kewenangan) adalah otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan secara politik dalam Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA.
  4. *Facilities* (fasilitas) adalah sumber daya peralatan pendukung dalam melakukan tugas operasionalnya (sarana dan prasarana) yang harus dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA.
- c. *Disposition* adalah sikap positif pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tujuan dalam Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA. *Disposition* terdiri dari:
1. *Effect of disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) adalah sikap pelaksana yang menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata

Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA.

d. struktur birokrasia dalah struktur organisasi, pembagian wewenang dalam Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA.

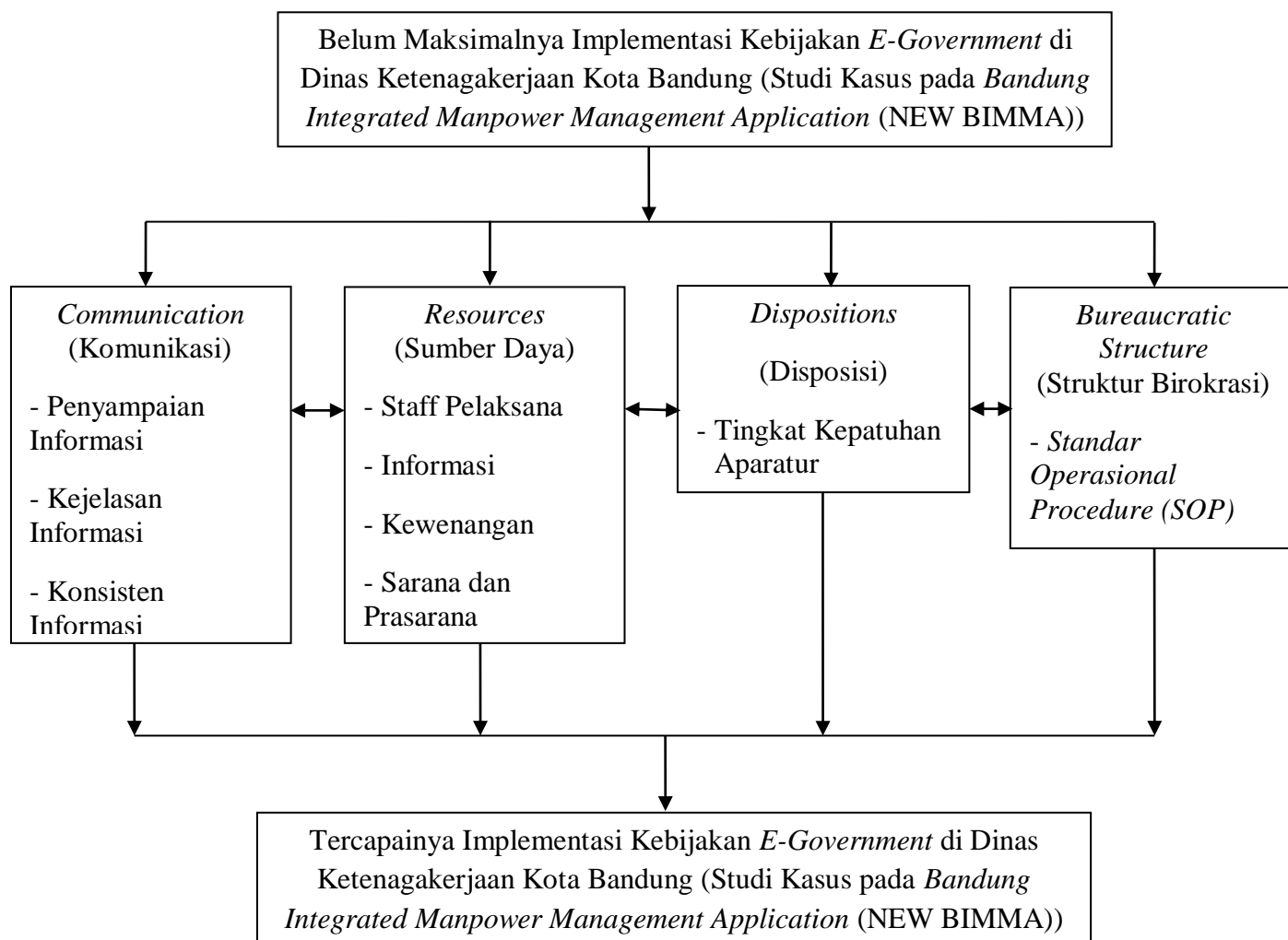
*Bureaucratic structure* terdiri dari:

1. *Standard Operating Prosedures* (SOP) adalah mekanisme, sistem dan prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan, dan tanggung jawab dalam Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA.

Pengertian diatas terdapat tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu agar tercapainya suatu Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada Aplikasi NEW BIMMA bagi Masyarakat Kota Bandung agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Tabel 2.1

## Kerangka Pemikiran



### 2.3 Proposisi

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran peneliti diatas, maka proposisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada *Bandung Integrated Manpower Management Application* (NEW BIMMA)) ditentukan oleh Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.